

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Persaingan ekonomi dalam masyarakat Indonesia hari ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat domestik saja, tetapi diramaikan juga oleh kelompok atau masyarakat negara-negara lain. Paham pasar bebas yang didasarkan atas perdagangan lintas negara, membuat persaingan menjadi rumit dan sengit bagi siapa saja yang menjadi subjek pelaku ekonomi di Indonesia. Salah satu subjek pelaku ekonomi yang sedang dilanda kekhawatiran di tengah sengitnya persaingan ekonomi di Indonesia adalah para usaha kecil menengah (UKM). Mereka khawatir dengan teknologi yang masih relatif rendah, sumber daya yang rendah, serta modal yang sangat minim yang mereka miliki, ketika harus berhadapan bersaing dengan para industri transnasional Dunia Ke 1, yang secara teknologi sudah sangat canggih, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, serta dengan modal yang sangat besar. Keadaan ini jelas ancaman bagi masyarakat kelas menengah kebawah, yang notabene sejak dulu menciptakan, merintis dan membangun usaha kecil menengah.

Usaha kecil menengah pada umumnya lahir dari usaha rumah tangga dengan skala mikro, yang kemudian berkembang. Dengan skala produksi yang kecil, maka diharapkan tingkat fleksibilitas dari perusahaan lebih baik yang pada akhirnya dapat lebih bertahan pada saat terjadi krisis bila dibandingkan dengan industri besar.

Pada saat krisis ekonomi melanda dunia, dimana pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, maka banyak orang menilai bahwa sektor UKM menjadi penyelamat pergerakan roda perekonomian. Dimana antara lain dapat menurunkan tingkat pengangguran (Netty Priska Pandiangan, 2012) serta penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini dapat dimengerti, karena pada saat terjadi PHK pada perusahaan besar, maka akan berdampak lahirnya UKM baru yang diciptakan oleh karyawan yang terkena PHK.

Persaingan dalam pasar domestik dan internasional tidaklah mudah. Banyak faktor yang menjadi kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan pada sektor UKM. Kendala dan tantangan tersebut bukan saja dari kondisi internal perusahaan tetapi juga dari kondisi eksternal. Kendala atau keterbatasan yang dihadapi oleh UKM bahkan cenderung lebih beragam dibandingkan dengan industri besar. Jenis produk yang dihasilkan, jenis kegiatan proses produksi yang dilakukan, luasnya lingkup usaha, sumber pembiayaan serta lokasi tempat industri adalah beberapa hal yang sering menjadi faktor kendala pada usaha kecil dan menengah.

Secara umum kendala yang ada pada UKM dapat dikelompokkan kedalam dua perspektif. Pertama, perspektif secara internal, dimana faktor kondisi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri yang menjadi keterbatasan untuk berkembangnya perusahaan, seperti, masih rendahnya penggunaan teknologi, sumber daya manusia yang rendah, pengetahuan tentang pasar yang kurang, serta manajemen keuangan dan pasar yang kurang ahli. Kedua adalah perspektif eksternal, yang merupakan faktor yang berkaitan dengan iklim usaha dari usaha

kecil dan menengah, seperti: pasar bebas, industri besar domestik, industri besar internasional, kebijakan pemerintah, serta perilaku konsumen.

Peran pemerintah sangat diharuskan untuk mengatasi keadaan ini, agar UKM dapat tetap bertahan dan keluar dari kendala-kendala itu. Karena UKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Karena posisi yang strategis tersebut, pemerintah harus mewujudkan peran pragmatis dan etisnya.

Menurut Evans (Ahmad Erani Yustika, 2011:ix) setidaknya mengidentifikasi empat tipikal jenis intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan peran pragmatis dan etisnya, yakni *custodian*, *demiurge*, *midwife*, dan *husbandry*. Peran *custodian* mengacu pada fungsi negara untuk melindungi, mengawasi, dan mencegah terjadinya perilaku ekonomi tertentu yang dipandang merugikan, seperti perusahaan yang anti kompetisi, produksi barang yang kurang bermutu atau tidak aman, dan operasi firma yang merusak lingkungan. Sedangkan peran *demiurge* mengharapkan negara berfungsi maksimal dalam keterlibatannya memproduksi barang dan jasa. Negara bukan saja sebagai fasilitator perekonomian tetapi sekaligus sebagai pelaku. Berikutnya, peran *midwife* adalah menjadi mitra dari sektor swasta karena dianggap sektor ini masih belum mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan, di samping organisasi produksinya belum efisien. Lebih penting lagi, negara harus memberikan perlindungan kepada sektor swasta, khususnya untuk

perusahaan-perusahaan pemula agar tidak tergelincir dan kalah bersaing berhadapan dengan kompetitor asing. Terakhir, peran *husbandry* berkenaan dengan campur tangan negara untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pendekatan ini menyakini bahwa peran negara yang vital adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mobilisasi ekonomi, mengidentifikasi sumber daya negara, mengorganisasi riset dan pengembangan, dan jaminan utang untuk peningkatan investasi.

Keempat peran negara dalam pembangunan ekonomi tersebut tentu saja masih menggambarkan negara sebagai institusi rasional yang bisa mengawal seluruh proses pembangunan secara tepat.

Salah satu hasil UKM Indonesia adalah sepatu Cibaduyut. Sepatu Cibaduyut memang sedari dulu sudah sangat terkenal sekali sebagai salah satu daerah penghasil sepatu terbesar di Indonesia. Industri Sepatu Cibaduyut juga pada umumnya lahir dari industri rumah tangga dengan skala mikro, yang kemudian berkembang. saat ini terdapat kurang lebih 867 unit usaha sepatu didaerah ini. Macam-macam produk sepatu yang diproduksi diantaranya seperti sepatu Keds, Vantofel, Sepatu wanita, sepatu anak dll. Kapasitas produksi sentra sepatu Cibaduyut ini per tahunnya sebanyak 4.902.780 pasang dengan nilai investasi Rp. 14.669.123.000,00 dan menyerap tenaga kerja pekerja 3.613 Orang (Dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2009).

UKM sepatu Cibaduyut juga merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan dalam mewujudkan

stabilitas nasional, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam iklim pasar bebas ini, UKM sepatu Cibaduyut rentan mengalami kebangkrutan. Perdagangan bebas yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2010 cukup berdampak bagi para pelaku usaha kecil di Jawa Barat. Diberlakukannya perdagangan bebas menyebabkan persaingan produk UKM pun semakin ketat. Apalagi produk impor yang cenderung lebih murah, membanjiri pasar dalam negeri, sehingga tidak heran banyak pelaku UKM yang terpuruk. Imbas perdagangan bebas pun sangat dirasakan oleh para perajin sepatu di sentra sepatu Cibaduyut, banyak perajin yang terpukul dan beralih profesi ke sektor lainnya. Kontan saja kondisi tersebut membuat aktivitas produksi pun turun, apalagi banyak tenaga kerja yang ahli di bidang persepatuan beralih profesi ke bidang lain. Kondisi tersebut memang sangat berdampak pada produksi, karena para perajin banyak yang kehilangan tenaga kerja andal. Saat ini para perajin sepatu mengeluh karena tenaga kerja terampil pertukangan sepatu sulit didapat.

Sementara di sisi lain permintaan terhadap sepatu cukup tinggi dan membuat para perajin kewalahan. Tidak heran banyak permintaan yang terabaikan, karena perajin tidak bisa memenuhi permintaan. Seperti keterangan yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan salah seorang perajin alas kaki Cibaduyut, seperti berikut ini:

"Memang saat ini yang paling dikeluhkan para perajin adalah masalah tenaga kerja. Saat ini tenaga kerja pertukangan sepatu sangat kurang. Hal itu sebagai

dampak dari perdagangan bebas beberapa waktu lalu”. (wawancara dengan Ruly, salah seorang perajin alas kaki Cibaduyut pada tanggal 18 April 2013).

Di tengah aktivitas usaha dan perdagangan bebas Asia Pasifik dan dunia saat ini, produsen sepatu di kawasan Cibaduyut Bandung diharapkan bisa tetap bertahan dan memenangkan persaingan. Untuk bisa bersaing, kualitas produk yang dihasilkan tidak kecuali harga, distribusi dan layanan purna jual haruslah benar-benar diterima baik konsumen. Persoalannya, belum semua pelaku usaha menguasai strategi manajemen dalam mendayagunakan peluangnya. dengan meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan kelebihannya agar usahanya tidak jalan ditempat, usaha ini harus dibarengi dan didukung oleh peran pemerintah. Pemerintah lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat harus mengejawantahkan peran pragmatis dan etisnya dalam memberdayakan para UKM alas kaki Cibaduyut. Memang, institusi pemerintah tersebutlah yang berkewajiban untuk menjaga baiknya keberjalanan UKM sepatu Cibaduyut dan UKM lain nya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebagai pelaksana sektor perindustrian dan perdagangan, harus meningkatkan kinerjanya, yang meliputi aspek pembinaan, penumbuhan, pengembangan, dan pengawasan. Menghadapi pasar bebas saat ini, peranan Disperindag diharapkan mampu memberi stimulan dan terapi terhadap kondisi stagnasi ekonomi yang dihadapi oleh UKM, sehingga UKM mampu bertahan serta keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan daerah perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun fungsinya sebagai:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan meliputi bidang industri logam mesin alat transportasi, tekstil dan produk tekstil, telematika dan elektronika, industri aneka, kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan,
2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan perdagangan meliputi industri logam mesin alat transportasi, tekstil dan produk tekstil, telematika dan elektronika, industri aneka, kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan,
3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas,
4. Penyelenggaraan fasilitasi pemungutan retribusi dan penerimaan pendapatan bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Dinas Koperasi UKM & Perindustrian Perdagangan, 2012:25).

Visi keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu operasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat mewujudkan sosok Provinsi Jawa Barat dibidang industri pada

tahun 2013 kearah berkembangnya produk-produk industri baik dalam konteks substitusi impor maupun orientasi ekspor secara mandiri maupun aliansi/kolaborasi sebagai hasil pengembangan klaster industri yang semakin kompetitif. Dalam bidang perdagangan diharapkan berkembangnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri baik yang bersumber dari produk dengan *local content* tinggi maupun terdapat kandungan impor dalam keseimbangan transaksi antar daerah dan antar negara yang mampu memberikan surplus kepada pendapatan regional Jawa Barat. Berdasarkan visi di atas, yaitu mewujudkan industri andalan daerah dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri, sertaantisipasi terhadap permasalahan, tantangan dan peluang yang diperkirakan akan muncul dalam lima tahun kedepan untuk menumbuhkan industri andalan daerah serta mengoptimalkan pasarnya di dalam dan di luar negeri, maka ditetapkan adalah misi :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri andalan daerah.
2. Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen
3. Meningkatkan perdagangan luar negeri
4. Mengelola sumber daya internal organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perindustrian dan perdagangan Jawa Barat.

Dengan tujuan, fungsi serta visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, diharap dapat berperan secara maksimal dalam meminimalkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada



perajin alas kaki Cibaduyut dan memaksimalkan kelebihannya agar usahanya tidak jalan ditempat. Dengan demikian, penulis mencoba meneliti, mendeskripsikan serta menganalisis peran dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Jawa Barat dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah pada para perajin sepatu di Cibaduyut.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal di lapangan yang dilakukan, banyak ditemukan masalah-masalah yang terjadi pada perajin alas kaki Cibaduyut. Adapun masalah yang teridentifikasi dalam observasi awal ini yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran.
3. Keterbatasan sumber daya manusia.
4. Kurangnya pemahaman keuangan dan akuntansi.
5. Banyak merek asing yang mulai menjajah alas kaki Cibaduyut.
6. Banyak rumah perajin yang dijual untuk dijadikan perumahan

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat pada usaha kecil menengah alas kaki Cibaduyut ?

2. Bagaimana respon perajin alas kaki Cibaduyut terhadap peran pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat di kawasan usaha kecil menengah alas kaki Cibaduyut.
2. Untuk mengetahui respon perajin alas kaki Cibaduyut terhadap peran pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dapat diambil kegunaan dari penelitian tersebut antara lain:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan serta menambah khazanah ilmu bagi manusia dalam kehidupannya. Disamping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga dapat berguna untuk memberikan masukan yang berarti bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam

meningkatkan kinerja pegawainya, serta memberikan penyadaran bagi para perajin sepatu Cibaduyut tentang sejauh mana keseriusan pemerintah dalam mendukung usaha yang sedang dijalankannya.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Anggota-anggota suatu kelompok atau suatu masyarakat berhubungan dan bertingkah laku dengan sesamanya mengikuti suatu pola tata hubungan yang berlaku umum diantara mereka. Pola tata hubungan yang mengatur bagaimana mereka harus berhubungan dan bertingkah laku satu sama lainnya itu adalah kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang diciptakan oleh anggota-anggota masyarakat tersebut untuk keperluan hidup berkelompok atau bermasyarakat.

Suatu kaidah atau norma memuat perintah-perintah dan larangan-larangan yang mewajibkan segenap anggota untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik dan berguna, dan melarang melakukan hal-hal yang dipandang tercela dan merugikan. Perintah dan larangan itu ditujukan untuk keteraturan hidup berkelompok atau bermasyarakat. Kaidah atau norma itu dapat diumpamakan bagaikan lampu setopan dijalan raya (*traffic light*). Bila lampu itu memberikan sinar merah, maka semua pemakai jalan yang menghadap ke arah sinar merah itu harus berhenti untuk memberikan kesempatan pada pemakai jalan yang datang dari jurusan lain, dan bila lampu memberi dengan tanda dengan sinar hijau, pemakai jalan raya harus segera berangkat. Bila pemakai jalan raya tidak mengikuti apa yang diisyaratkan oleh sinar-sinar tersebut, maka akan terjadilah kecelakaan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam berhubungan dan bertingkah laku antara sesamanya itu

masing-masing individu diharapkan kesadaran dan kesediannya untuk mematuhi pola tata-hubungan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut.

Norma-norma yang sudah kuat yang sudah diakui dan ditaati akan dibakukan dan dikukuhkan menjadi lembaga kemasyarakatan, yaitu suatu sistem tata-hubungan bagi individu-individu dalam suatu kelompok atau dalam suatu masyarakat dalam rangka kehidupan bermasyarakat (Syafri Hamid, 1994:56).

Suatu lembaga kemasyarakatan memiliki ciri pengakuan yang bersifat merata terhadap seluruh anggota kelompok atau masyarakat, sehingga dapat ditafsirkan sebagai suatu rem atau alat yang membatasi kebebasan individu dalam behubungan dan bertingkah laku, demi untuk keteraturan, keutuhan dan bahkan untuk kesejahteraan serta kebahagiaan hidup bermasyarakat.

Dinas Perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu organisasi sosial atau lembaga sosial kemasyarakatan yang mewakili Gubernur dalam Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2008-2013 sesuai peraturan daerah No.25 Tahun 2010, Hal. 11-1).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan ( Disperindag ) Provinsi Jawa Barat harus mempunyai suatu kaidah atau norma memuat perintah-perintah dan larangan-larangan yang mewajibkan segenap anggota masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang menjadi subjek pelaku industri dan perdagangan melakukan hal-

hal yang dipandang baik dan berguna, dan melarang melakukan hal-hal yang dipandang tercela dan merugikan, Hal ini dimaksudkan agar aktivitas perindustrian dan perdagangan dimasyarakat berjalan secara harmonis. Sebagai contoh, Industri besar harus diperingati dan diberikan batasan bila terlalu memonopoli perdagangan, karena bila industri besar terlalu rakus memonopoli pasar, industri kecil akan mengalami kesulitan mendapat mangsa pasar, dan selanjutnya industri kecil akan rentan mengalami kebangkrutan. Di sini Disperindag Provinsi Jawa Barat harus mempunyai sebuah regulasi yang dapat membuat industri besar maupun industri kecil berjalan secara bebarengan, yang pada akhirnya membuat mereka mendapatkan kenyamanan dan keuntungan ekonomi bersama.

Talcott Parson dalam teori struktural fungsionalnya mengungkapkan bahwa lembaga kemasyarakatan atau organisasi sosial atau institusi sosial seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat merupakan suatu sistem yang mengatur peranan dan konsep kolektivitas individu atau masyarakat yang tidak terbatas sesuai dengan pola-pola normatif dan nilai-nilai sosial budaya, sebagai alat kontrol sosial yang ada di dalam masyarakat (Doyle Paul Johnson, 1986:117).

Fungsionalisme struktural berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar.

Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan upaya untuk menghubungkan, sebisa mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif. Teori struktural fungsional juga mengatakan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan (K.J. Veeger, 1995:39)

Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus utama dari teori ini adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian, antara lain ; faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku.

Dalam fungsionalisme struktural Parsons terdapat empat imperatif fungsional bagi sistem tindakan, yaitu skema AGIL-nya yang terkenal. AGIL terdiri dari *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, *latency*. Fungsi merupakan suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2010: 252-253).

*Pertama*, adaptasi (*adaptation*): sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. *Kedua*, pencapaian tujuan (*goal attainment*): sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. *Ketiga*, integrasi (*integration*) : sistem harus mengatur hubungan bagian-

bagian komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A, G, L). *Keempat*, yaitu latensi atau pemeliharaan pola (*latency*) : sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritisnya.

